

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 34

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
7. Analisis Standar Belanja Fisik adalah besaran belanja uang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan, secara umum dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah yang melakukan pekerjaan fisik dan merupakan akumulasi obyek belanja kegiatan yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa.
9. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dari Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
11. Pengendali Belanja adalah suatu faktor terukur yang menyatakan jumlah target kinerja yang dianggap berpengaruh terhadap pengalokasian belanja dalam 1 (satu) aktivitas tertentu.
12. Satuan Pengendali Belanja Tetap adalah biaya yang tidak mengalami perubahan pada skala tertentu, sekalipun output yang dihasilkan mengalami perubahan.
13. Satuan Pengendali Belanja Variabel adalah biaya yang terjadi jika total jumlah output yang dihasilkan berubah, maka jumlah biaya yang dialokasikan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut juga berubah.
14. Rumus Perhitungan Belanja Total yang selanjutnya disebut Formula ASB adalah rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan yang berasal dari penjumlahan belanja tetap dan belanja variabel.
15. Aplikasi adalah perangkat lunak program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan berfungsi melakukan perintah sesuai dengan keinginan dari pembuat aplikasi.
16. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah.
17. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang atau jasa yang berlaku di Daerah yang digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
18. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standar Nasional Indonesia dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metoda pelaksanaan yang akan diterapkan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
ASB FISIK
Pasal 2

- (1) ASB fisik merupakan pedoman bagi SKPD dalam menentukan besaran belanja Sub Kegiatan berdasarkan aktivitas dan kebutuhan belanja setiap Sub Kegiatan dalam penyusunan RKA SKPD.

- (2) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam aktivitas, jenis belanja serta besaran belanjanya.

Pasal 3

ASB fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi ASB untuk bangunan gedung, pekerjaan jalan, pedestrian, saluran dan penerangan jalan umum.

Pasal 4

- (1) Struktur ASB fisik dan Formula ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diimplementasikan dalam Aplikasi.
- (2) Ketentuan mengenai Struktur ASB fisik dan Formula ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Penyusunan RKA SKPD terhadap Sub Kegiatan yang belum memiliki ASB dilaksanakan berpedoman pada Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
FISIK PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR ASB FISIK DAN FORMULA ASB

1. PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA

Deskripsi:

Gedung tidak sederhana merupakan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana. Adapun yang termasuk dalam bangunan gedung tidak sederhana adalah gedung kantor yang fungsi luasnya diatas 500 m² (lima ratus meter persegi) dan atau 2 Lantai.

Pengendali Belanja:

Luas bangunan gedung tidak sederhana

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp7.220.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp7.220.000,00 x luas bangunan gedung tidak sederhana dengan satuan meter persegi)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA

Deskripsi:

Gedung sederhana merupakan gedung dengan karakter yang sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi yang juga sederhana. Adapun yang termasuk dalam bangunan gedung sederhana adalah gedung kantor yang fungsi luasnya di bawah atau sama dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) dan atau 1 Lantai.

Pengendali Belanja:

Luas bangunan gedung sederhana

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp6.210.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp6.210.000,00 x luas bangunan gedung sederhana dengan satuan meter persegi)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA RUMAH TIPE A

Deskripsi:

Bangunan rumah negara tipe A adalah bangunan rumah yang di peruntukan untuk pejabat seperti Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat Setingkat. Rumah tipe A memiliki luas tanah sebesar 600 m² (enam ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi).

Pengendali Belanja:

Luas bangunan rumah

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp7.150.000,00 per per m² (meter persegi)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp7.150.000,00 x luas bangunan rumah)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA RUMAH TIPE B

Deskripsi:

Bangunan rumah negara tipe B adalah bangunan rumah yang di peruntukan untuk pejabat seperti Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi, Pejabat Setingkat, dan Pegawai Negeri Sipil (golongan IV/d dan IV/e). Rumah tipe B memiliki luas tanah sebesar 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) dan luas bangunan sebesar 120 m² (seratus dua puluh meter persegi).

Pengendali Belanja:

Luas bangunan rumah

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp6.730.000,00 per meter²

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp6.730.000,00 x luas bangunan rumah)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA RUMAH TIPE C

Deskripsi:

Bangunan rumah negara tipe C adalah bangunan rumah yang di peruntukan untuk pejabat seperti Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat Setingkat, dan Pegawai Negeri Sipil (golongan IV/a s/d IV/c). Rumah tipe C memiliki luas tanah sebesar 200 m² (dua ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 70 m² (tujuh puluh meter persegi).

Pengendali Belanja:

Luas bangunan rumah

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp5.680.000,00 per meter²

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp5.680.000,00 x luas bangunan rumah)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA RUMAH TIPE D

Deskripsi:

Bangunan rumah negara tipe D adalah bangunan rumah yang di peruntukan untuk pejabat seperti Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat Setingkat, dan Pegawai Negeri Sipil (golongan III/a s/d III/d). Rumah tipe D memiliki luas tanah sebesar 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan luas bangunan sebesar 50 m² (lima puluh meter persegi).

Pengendali Belanja:

Luas bangunan rumah

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp5.680.000,00 per meter²

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}5.680.000,00 \times \text{luas bangunan rumah}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA RUMAH TIPE E

Deskripsi:

Bangunan rumah negara tipe E adalah bangunan rumah yang di peruntukan untuk pejabat seperti Kepala Sub Seksi, Pejabat Setingkat, dan Pegawai Negeri Sipil (golongan II/d kebawah). Rumah tipe E memiliki luas tanah sebesar 100 m² (seratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 36 m² (tiga puluh enam persegi).

Pengendali Belanja:

Luas bangunan rumah

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

$$= \text{Rp}0,00 \text{ per kegiatan}$$

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

$$= \text{Rp}5.680.000,00 \text{ per meter}^2$$

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}5.680.000,00 \times \text{luas bangunan rumah}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA DEPAN TINGGI 1,5 METER

Deskripsi:

Pagar gedung negara depan adalah bangunan pagar gedung negara bagian depan yang tidak termasuk kedalam pembangunan gedung dengan tinggi 1,5 meter.

Pengendali Belanja:

Panjang pagar

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

$$= \text{Rp}0,00 \text{ per kegiatan}$$

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

$$= \text{Rp}3.440.000,00 \text{ per meter}$$

Rumus Penghitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}3.440.000,00 \times \text{panjang pagar}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

9. PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA BELAKANG TINGGI 2,5 METER

Deskripsi:

Pagar gedung negara belakang adalah bangunan pagar gedung negara bagian belakang yang tidak termasuk kedalam pembangunan gedung dengan tinggi 2,5 meter.

Pengendali Belanja:

Panjang pagar

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp2.650.000,00 per meter

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp2.650.000,00 x panjang pagar)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

10. PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA SAMPING TINGGI 2 METER

Deskripsi:

Pagar gedung negara samping adalah bangunan pagar gedung negara bagian samping yang tidak termasuk kedalam pembangunan gedung dengan tinggi 2 meter.

Pengendali Belanja:

Panjang pagar

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp1.750.000,00 per meter

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp1.750.000,00 x panjang pagar)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

11. PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN TINGGI 1,5 METER

Deskripsi:

Pagar rumah negara depan adalah bangunan pagar rumah negara bagian depan yang tidak termasuk kedalam pembangunan rumah dengan tinggi 1,5 meter.

Pengendali Belanja:

Panjang pagar

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp2.970.000,00 per meter

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp2.970.000,00 x panjang pagar)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

12. PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA BELAKANG TINGGI 2,5 METER

Deskripsi:

Pagar rumah negara belakang adalah bangunan pagar rumah negara bagian belakang yang tidak termasuk kedalam pembangunan rumah dengan tinggi 2,5 meter.

Pengendali Belanja:

Panjang pagar

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp2.630.000,00 per meter

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp2.630.000,00 x panjang pagar)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

13. PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA SAMPING TINGGI 2 METER
Deskripsi:

Pagar rumah negara samping adalah bangunan pagar rumah negara bagian samping yang tidak termasuk kedalam pembangunan rumah dengan tinggi 2 meter.

Pengendali Belanja:

Panjang pagar

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp1.720.000,00 per meter

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp1.720.000,00 x panjang pagar)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran, kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

14. INGKATAN DRAINASE PEKERJAAN SALURAN *U-DITCH* TIPE U DENGAN TUTUP TIPE HD LEBAR=30CM; TINGGI=30CM

Deskripsi:

Pekerjaan peningkatan drainase berupa pemasangan saluran U-Ditch tipe U dengan tutup tipe HD (*Heavy Duty*) adalah kegiatan konstruksi saluran terbuka pracetak yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan fungsi sistem drainase di kawasan tertentu agar dapat mengalirkan air hujan atau limpasan permukaan secara lebih efektif.

Saluran U-Ditch yang digunakan memiliki dimensi lebar 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan tinggi 30 cm (tiga puluh sentimeter), lengkap dengan penutup (*cover*) bertipe HD (*Heavy Duty*) yang dirancang untuk menahan beban lalu lintas ringan hingga sedang di atasnya, seperti pada area trotoar, bahu jalan, atau akses lingkungan.

Pengendali Belanja:

Cakupan area yang terairi

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 1.635.000,00 per meter

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp1.635.000,00 x Panjang saluran drainase)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

15. PENINGKATAN DRAINASE PEKERJAAN SALURAN *U-DITCH* TIPE U DENGAN TUTUP TIPE HD LEBAR=40CM; TINGGI=40CM

Deskripsi:

Pekerjaan peningkatan drainase berupa pemasangan saluran *U-Ditch* tipe U dengan tutup tipe HD (*Heavy Duty*) adalah kegiatan konstruksi saluran terbuka pracetak yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan fungsi sistem drainase di kawasan tertentu agar dapat mengalirkan air hujan atau limpasan permukaan secara lebih efektif.

Saluran *U-Ditch* yang digunakan memiliki dimensi lebar 40 cm (empat puluh sentimeter) dan tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter), lengkap dengan penutup (*cover*) bertipe HD (*Heavy Duty*) yang dirancang untuk menahan beban lalu lintas ringan hingga sedang di atasnya, seperti pada area trotoar, bahu jalan, atau akses lingkungan.

Pengendali Belanja:

Cakupan area yang terairi

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 2.145.000,00 per meter

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp2.145.000,00 x Panjang saluran drainase)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

16. PENINGKATAN DRAINASE PEKERJAAN SALURAN *U-DITCH* TIPE U DENGAN TUTUP TIPE HD LEBAR = 50CM; TINGGI = 50CM

Deskripsi:

Pekerjaan peningkatan drainase berupa pemasangan saluran *U-Ditch* tipe U dengan tutup tipe HD (*Heavy Duty*) adalah kegiatan konstruksi saluran terbuka pracetak yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan fungsi sistem drainase di kawasan tertentu agar dapat mengalirkan air hujan atau limpasan permukaan secara lebih efektif.

Saluran *U-Ditch* yang digunakan memiliki dimensi lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan tinggi 50 cm (lima puluh sentimeter), lengkap dengan penutup (*cover*) bertipe HD (*Heavy Duty*) yang dirancang untuk menahan beban lalu lintas ringan hingga sedang di atasnya, seperti pada area trotoar, bahu jalan, atau akses lingkungan.

Pengendali Belanja:

Cakupan area yang terairi

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

=Rp 2.728.000,00 per meter

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp2.728.000,00 x Panjang saluran drainase)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

17. PENINGKATAN DRAINASE PEKERJAAN SALURAN *U-DITCH* TIPE U DENGAN TUTUP TIPE HD LEBAR = 60CM; TINGGI = 60CM

Deskripsi:

Pekerjaan peningkatan drainase berupa pemasangan saluran *U-Ditch* tipe U dengan tutup tipe HD (*Heavy Duty*) adalah kegiatan konstruksi saluran terbuka pracetak yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan fungsi sistem drainase di kawasan tertentu agar dapat mengalirkan air hujan atau limpasan permukaan secara lebih efektif.

Saluran *U-Ditch* yang digunakan memiliki dimensi lebar 60 cm (enam puluh sentimeter) dan tinggi 60 cm (enam puluh sentimeter), lengkap dengan penutup (*cover*) bertipe HD (*Heavy Duty*) yang dirancang untuk menahan beban lalu lintas ringan hingga sedang di atasnya, seperti pada area trotoar, bahu jalan, atau akses lingkungan.

Pengendali Belanja:

Cakupan area yang terairi

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 3.210.000,00 per meter

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp3.210.000,00 x Panjang saluran drainase)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

18. PENINGKATAN DRAINASE PEKERJAAN SALURAN *U-DITCH* TIPE U DENGAN TUTUP TIPE HD LEBAR = 80CM; TINGGI = 80CM

Deskripsi:

Pekerjaan peningkatan drainase berupa pemasangan saluran *U-Ditch* tipe U dengan tutup tipe HD (*Heavy Duty*) adalah kegiatan konstruksi saluran terbuka pracetak yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan fungsi sistem drainase di kawasan tertentu agar dapat mengalirkan air hujan atau limpasan permukaan secara lebih efektif.

Saluran *U-Ditch* yang digunakan memiliki dimensi lebar 80cm (delapan puluh sentimeter) dan tinggi 80cm (delapan puluh sentimeter), lengkap dengan penutup (*cover*) bertipe HD (*Heavy Duty*) yang dirancang untuk

menahan beban lalu lintas ringan hingga sedang di atasnya, seperti pada area trotoar, bahu jalan, atau akses lingkungan.

Pengendali Belanja:

Cakupan area yang terairi

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 4.294.000,00 per meter

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp4.294.000,00 x Panjang saluran drainase)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

19. PENINGKATAN DRAINASE PEKERJAAN SALURAN U-DITCH TIPE U DENGAN TUTUP TIPE HD LEBAR = 100CM; TINGGI = 100CM

Deskripsi:

Pekerjaan peningkatan drainase berupa pemasangan saluran U-Ditch tipe U dengan tutup tipe HD (*Heavy Duty*) adalah kegiatan konstruksi saluran terbuka pracetak yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan fungsi sistem drainase di kawasan tertentu agar dapat mengalirkan air hujan atau limpasan permukaan secara lebih efektif.

Saluran U-Ditch yang digunakan memiliki dimensi lebar 100cm (seratus sentimeter) dan tinggi 100 cm (seratus sentimeter), lengkap dengan penutup (*cover*) bertipe HD (*Heavy Duty*) yang dirancang untuk menahan beban lalu lintas ringan hingga sedang di atasnya, seperti pada area trotoar, bahu jalan, atau akses lingkungan.

Pengendali Belanja:

Cakupan area yang terairi

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 5.988.000,00 per meter

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp5.988.000,00 x Panjang saluran drainase)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

20. PENINGKATAN DRAINASE PEKERJAAN SALURAN BOX CULVERT LEBAR = 40CM; TINGGI = 40CM

Deskripsi:

Pekerjaan pembangunan saluran box culvert pracetak berukuran lebar 40 cm (empat puluh sentimeter) dan tinggi 40cm (empat puluh sentimeter) merupakan bagian dari sistem drainase tertutup yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan, air permukaan, atau air limbah secara efisien di bawah permukaan tanah atau jalan. Saluran ini dirancang untuk menyalurkan aliran air di area padat bangunan atau area dengan kebutuhan struktur yang kokoh dan tahan beban dari atas, seperti di bawah jalan, trotoar, atau akses kendaraan.

Pengendali Belanja:

Cakupan area yang terairi

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 4.661.000,00 per meter

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp4.661.000,00 x Panjang saluran drainase)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

21. PENINGKATAN DRAINASE PEKERJAAN SALURAN BOX CULVERT LEBAR = 50CM; TINGGI = 50CM

Deskripsi:

Pekerjaan pembangunan saluran box culvert pracetak berukuran lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan tinggi 50 cm (lima puluh sentimeter) merupakan bagian dari sistem drainase tertutup yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan, air permukaan, atau air limbah secara efisien di bawah permukaan tanah atau jalan. Saluran ini dirancang untuk menyalurkan aliran air di area padat bangunan atau area dengan kebutuhan struktur yang kokoh dan tahan beban dari atas, seperti di bawah jalan, trotoar, atau akses kendaraan.

Pengendali Belanja:

Cakupan area yang terairi

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 5.988.000,00 per meter

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 5.988.000,00 x Panjang saluran drainase)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

22. PENINGKATAN DRAINASE PEKERJAAN SALURAN BOX CULVERT
LEBAR = 60CM; TINGGI = 60CM

Deskripsi:

Pekerjaan pembangunan saluran box culvert pracetak berukuran lebar 60 cm (enam puluh sentimeter) dan tinggi 60 cm (enam puluh sentimeter) merupakan bagian dari sistem drainase tertutup yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan, air permukaan, atau air limbah secara efisien di bawah permukaan tanah atau jalan. Saluran ini dirancang untuk menyalurkan aliran air di area padat bangunan atau area dengan kebutuhan struktur yang kokoh dan tahan beban dari atas, seperti di bawah jalan, trotoar, atau akses kendaraan.

Pengendali Belanja:

Cakupan area yang terairi

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 7.139.000,00 per meter

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp7.139.000,00 x Panjang saluran drainase)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

23. PENINGKATAN DRAINASE PEKERJAAN SALURAN BOX CULVERT
LEBAR = 80CM; TINGGI = 80CM

Deskripsi:

Pekerjaan pembangunan saluran box culvert pracetak berukuran lebar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan tinggi 80 cm (delapan puluh sentimeter) merupakan bagian dari sistem drainase tertutup yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan, air permukaan, atau air limbah secara efisien di bawah permukaan tanah atau jalan. Saluran ini dirancang untuk menyalurkan aliran air di area padat bangunan atau area dengan kebutuhan struktur yang kokoh dan tahan beban dari atas, seperti di bawah jalan, trotoar, atau akses kendaraan.

Pengendali Belanja:

Cakupan area yang terairi

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 9.833.000,00 per meter

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}9.833.000,00 \times \text{Panjang saluran drainase}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

24. PENINGKATAN DRAINASE PEKERJAAN SALURAN *BOX CULVERT* LEBAR = 100CM; TINGGI = 100CM

Deskripsi:

Pekerjaan pembangunan saluran box culvert pracetak berukuran lebar 100 cm (seratus sentimeter) dan tinggi 100 cm (seratus sentimeter) merupakan bagian dari sistem drainase tertutup yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan, air permukaan, atau air limbah secara efisien di bawah permukaan tanah atau jalan. Saluran ini dirancang untuk menyalurkan aliran air di area padat bangunan atau area dengan kebutuhan struktur yang kokoh dan tahan beban dari atas, seperti di bawah jalan, trotoar, atau akses kendaraan.

Pengendali Belanja:

Cakupan area yang terairi

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 12.253.000,00 per meter

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}12.253.000,00 \times \text{Panjang saluran drainase}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

25. REKONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN DENGAN PERKERASAN ASPAL LEBAR = 1M S/D 4M; TEBAL = 3CM

Deskripsi:

Rekonstruksi ruas jalan lingkungan dengan perkerasan aspal merupakan peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Perkerasan aspal yang direncanakan memiliki lebar 1m (satu meter) sampai dengan 4m (empat meter), dengan tebal 3cm (tiga sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp257.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp257.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

26. REKONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN DENGAN PERKERASAN ASPAL
LEBAR = 4M S/D 8M; TEBAL = 4CM

Deskripsi:

Rekonstruksi ruas jalan lingkungan dengan perkerasan aspal merupakan peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Perkerasan aspal yang direncanakan memiliki lebar 4m (empat meter) sampai dengan 8m (delapan meter), dengan tebal 4cm (empat sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp312.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp312.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

27. REKONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN DENGAN PERKERASAN BETON
LEBAR = 1M S/D 5M; TEBAL = 10CM

Deskripsi:

Rekonstruksi ruas jalan lingkungan dengan beton merupakan peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak

berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Perkerasan beton yang direncanakan memiliki lebar 1m (satu meter) sampai dengan 5m (lima meter), dengan tebal 10cm (sepuluh sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp276.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp276.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

28. REKONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN DENGAN PERKERASAN BETON
LEBAR = 1 S/D 5M; TEBAL = 15CM

Deskripsi:

Rekonstruksi ruas jalan lingkungan dengan beton merupakan peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Perkerasan beton yang direncanakan memiliki lebar 1m (satu meter) sampai dengan 15m (lima belas meter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp399.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp399.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

29. REKONSTRUKSI JALAN LINGKUNGAN DENGAN PERKERASAN BETON
LEBAR = 6M; TEBAL = 20CM

Deskripsi:

Rekonstruksi ruas jalan lingkungan dengan beton merupakan peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Perkerasan beton yang direncanakan memiliki lebar 6m (enam meter), dengan tebal 20cm (dua puluh sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp513.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp513.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

30. REKONSTRUKSI JALAN LOKAL DENGAN PERKERASAN ASPAL LEBAR = 3M S/D 8M ; TEBAL = 4CM

Deskripsi:

Rekonstruksi ruas jalan lokal dengan perkerasan aspal merupakan peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Perkerasan aspal yang direncanakan memiliki lebar 3m (tiga meter) sampai dengan 8m (delapan meter), dengan tebal 4cm (empat sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp322.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp322.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

31. REKONSTRUKSI JALAN LOKAL DENGAN PERKERASAN BETON LEBAR = 3M S/D 8M ; TEBAL = 15CM

Deskripsi:

Rekonstruksi ruas jalan lokal dengan beton merupakan peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Perkerasan beton yang direncanakan memiliki lebar 3m (tiga meter) sampai dengan 8m (delapan meter), dengan tebal 15cm (lima belas sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp393.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp393.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

32. REKONSTRUKSI JALAN KOLEKTOR DENGAN PERKERASAN ASPAL LEBAR = 5M S/D 10M ; TEBAL = 4CM

Deskripsi:

Rekonstruksi ruas jalan kolektor dengan aspal merupakan peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Perkerasan aspal yang direncanakan memiliki lebar 5m (lima meter) sampai dengan 10m (sepuluh meter), dengan tebal 4cm (empat sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp328.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variable} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}328.000,00 \times \text{panjang jalan}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

33. REKONSTRUKSI JALAN KOLEKTOR DENGAN PERKERASAN BETON
LEBAR = 5M S/D 10M ; TEBAL = 15CM

Deskripsi:

Rekonstruksi ruas jalan kolektor dengan beton merupakan peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Perkerasan beton yang direncanakan memiliki lebar 5m (lima meter) sampai dengan 10m (sepuluh meter), dengan tebal 15cm (lima belas sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

$$= \text{Rp}0,00 \text{ Per kegiatan}$$

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

$$= \text{Rp}395.000,00 \text{ per m}^2 \text{ (meter persegi)}$$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variable} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp}395.000,00 \times \text{panjang jalan}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

34. REKONSTRUKSI JALAN KOLEKTOR DENGAN PERKERASAN BETON
LEBAR = 5M S/D 10M ; TEBAL = 20CM

Deskripsi:

Rekonstruksi ruas jalan kolektor dengan beton merupakan peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Perkerasan beton yang direncanakan memiliki lebar 5 m (lima meter) sampai dengan 10m (sepuluh meter), dengan tebal 20 cm (dua puluh sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp603.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp603.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

35. REKONSTRUKSI JALAN KOLEKTOR DENGAN PERKERASAN BETON
LEBAR = 5M S/D 10M ; TEBAL = 25CM

Deskripsi:

Rekonstruksi ruas jalan kolektor dengan beton merupakan peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

Perkerasan beton yang direncanakan memiliki lebar 5m (lima meter) sampai dengan 10 m (sepuluh meter), dengan tebal 25 cm (dua puluh lima sentimetr).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp729.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp729.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

36. PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN PEDESTRIAN (*ANDESIT* T = 3CM) TANPA SALURAN DAN *DUCTING*, LEBAR = 1M S/D 4M; TEBAL = 3CM

Deskripsi:

Pembangunan jalan pedestrian menggunakan andesit dengan tebal 3 cm merupakan kegiatan membangun atau merevitalisasi jalur khusus untuk pejalan kaki, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas pejalan kaki.

Pekerjaan yang direncanakan tanpa saluran dan ducting dengan lebar 1m (satu meter) sampai dengan 4m (empat meter), dan tebal 3cm (tiga sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp879.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp879.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

37. PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN PEDESTRIAN (*STAMP CONCRETE* T=10CM) TANPA PEKERJAAN SALURAN (ASUMSI SALURAN EKSISTING BAIK) DAN TANPA *DUCTING* UTILITAS, LEBAR = 1M S/D 4M ; TEBAL = 10CM

Deskripsi:

Pembangunan jalan pedestrian menggunakan stamp concrete dengan tebal 10cm (sepuluh sentimeter) merupakan kegiatan membangun atau merevitalisasi jalur khusus untuk pejalan kaki, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas pejalan kaki.

Pekerjaan yang direncanakan tanpa saluran (asumsi saluran eksisting baik) dan tanpa ducting utilitas dengan lebar 1m (satu meter) sampai dengan 4m (empat meter) dan tebal 10cm (sepuluh sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp2.501.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp2.501.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

38. PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN PEDESTRIAN (*STAMP CONCRETE* T = 10CM) TANPA PEKERJAAN SALURAN (ASUMSI SALURAN EKSISTING BAIK) + *DUCTING* 6", LEBAR = 1M S/D 4M ; TEBAL = 10CM

Deskripsi:

Pembangunan jalan pedestrian menggunakan stamp concrete dengan tebal 10 cm merupakan kegiatan membangun atau merevitalisasi jalur khusus untuk pejalan kaki, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas pejalan kaki.

Pekerjaan yang direncanakan tanpa saluran (asumsi saluran eksisting baik) ditambahkan pekerjaan ducting ukuran 6" (enam inchi) dengan lebar 1m (satu meter) sampai dengan 4m (empat meter) dan tebal 10cm (sepuluh sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp2.537.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp2.537.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

39. PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN PEDESTRIAN (*STAMP CONCRETE* T = 10CM) DENGAN SALURAN MENGGUNAKAN *U-DICTH* U 500/500 + *DUCTING* 6", LEBAR = 1M S/D 4M ; TEBAL = 10CM

Deskripsi:

Pembangunan jalan pedestrian menggunakan stamp concrete dengan tebal 10cm (sepuluh sentimeter) merupakan kegiatan membangun atau merevitalisasi jalur khusus untuk pejalan kaki, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas pejalan kaki.

Pekerjaan yang direncanakan dengan saluran menggunakan U-Ditch ukuran 500mm (lima ratus milimeter)/500mm (lima ratus milimeter) dan pekerjaan ducting ukuran 6" (enam inchi), dengan lebar 1m (satu meter) sampai dengan 4m (empat meter) dan tebal 10cm (sepuluh sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp3.806.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp3.806.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

40. PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN PEDESTRIAN (*FLOOR HARDENER FINISH COATING* T = 10CM) TANPA PEKERJAAN SALURAN (ASUMSI SALURAN EKSISTING BAIK) DAN TANPA *DUCTING* UTILITAS, LEBAR = 1M S/D 4M ; TEBAL = 10CM

Deskripsi:

Pembangunan jalan pedestrian menggunakan floor hardener finish coating dengan tebal 10cm (sepuluh sentimeter) merupakan kegiatan membangun atau merevitalisasi jalur khusus untuk pejalan kaki, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas pejalan kaki.

Pekerjaan yang direncanakan tanpa saluran (asumsi saluran eksisting baik) dan tanpa ducting utilitas, dengan lebar 1m (satu meter) sampai dengan 4m (empat meter) dan tebal 10cm (sepuluh sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp2.295.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp2.295.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

41. PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN PEDESTRIAN (*FLOOR HARDENER FINISH COATING* T = 10CM) TANPA PEKERJAAN SALURAN (ASUMSI SALURAN EKSISTING BAIK) + *DUCTING* 6", LEBAR = 1 S/D 4M ; TEBAL = 10CM

Deskripsi:

Pembangunan jalan pedestrian menggunakan floor hardener finish coating dengan tebal 10cm (sepuluh sentimeter) merupakan kegiatan membangun atau merevitalisasi jalur khusus untuk pejalan kaki, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas pejalan kaki.

Pekerjaan yang direncanakan tanpa saluran (asumsi saluran eksisting baik) ditambahkan pekerjaan ducting ukuran 6" (enam inchi) dengan lebar 1m (satu meter) sampai dengan 4m (empat meter) dan tebal 10cm (sepuluh sentimeter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp2.583.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp2.583.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

42. PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN PEDESTRIAN (*FLOOR HARDENER FINISH COATING T = 10CM*) DENGAN SALURAN MENGGUNAKAN *U-DITCH U 500/500 + DUCTING 6"*, LEBAR = 1M S/D 4M ; TEBAL = 10CM

Deskripsi:

Pembangunan jalan pedestrian menggunakan floor hardener finish coating dengan tebal 10cm (sepuluh sentimeter) merupakan kegiatan membangun atau merevitalisasi jalur khusus untuk pejalan kaki, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas pejalan kaki.

Pekerjaan yang direncanakan dengan saluran menggunakan U-Ditch ukuran 500 mm/500 mm dan pekerjaan ducting ukuran 6", dengan lebar 1 s/d 4 m, dan tebal 10 cm.

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp3.616.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp3.616.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

43. PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN PEDESTRIAN (*PAVING BLOCK* T = 6 CM) TANPA SALURAN, LEBAR = 1 S/D 4M ; TEBAL = 6CM

Deskripsi:

Pembangunan jalan pedestrian menggunakan paving block dengan tebal 6 cm merupakan kegiatan membangun atau merevitalisasi jalur khusus untuk pejalan kaki, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas pejalan kaki.

Pekerjaan yang direncanakan tanpa saluran (asumsi saluran eksisting baik), dengan lebar 1 s/d 4 m, dan tebal 6 cm.

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp607.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp607.000,00 x panjang jalan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

44. PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN STRUKTUR BETON, BENTANG = 5M ; LEBAR = 5M

Deskripsi:

Jembatan merupakan salah satu bangunan pelengkap untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis, jembatan dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar perlu dilakukan adanya perkuatan atau penggantian.

Pekerjaan pembangunan jembatan struktur beton yang direncanakan memiliki bentang 5 m (lima meter) dan lebar 5 m (lima meter).

Pengendali Belanja:

Panjang jalan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp18.031.000,00 per m² (meter persegi)

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variable

= Rp0,00 + (Rp18.031.000,00 x panjang jembatan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

45. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (K3) MENURUT NILAI BIAYA FISIK 0 S/D 200 JUTA

Deskripsi:

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3 Konstruksi) menurut nilai biaya fisik pekerjaan dengan rentang nilai 0 s/d 200 juta merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di sektor konstruksi.

Pengendali Belanja:

Nilai Biaya Fisik

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp1.784.000,00 per kegiatan

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

46. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (K3) MENURUT NILAI BIAYA FISIK 200 JUTA S/D 500 JUTA

Deskripsi:

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3 Konstruksi) menurut nilai biaya fisik pekerjaan dengan rentang nilai 200 juta s/d 500 juta merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di sektor konstruksi.

Pengendali Belanja:

Nilai Biaya Fisik

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp4.754.000,00 per kegiatan

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

47. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (K3) MENURUT NILAI BIAYA FISIK 500 JUTA S/D 1 MILIAR

Deskripsi:

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3 Konstruksi) menurut nilai biaya fisik pekerjaan dengan rentang nilai 500 juta s/d 1 miliar merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di sektor konstruksi.

Pengendali Belanja:

Nilai Biaya Fisik

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp8.448.000,00 per kegiatan

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

48. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (K3) MENURUT NILAI BIAYA FISIK 1 MILIAR S/D 5 MILIAR

Deskripsi:

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3 Konstruksi) menurut nilai biaya fisik pekerjaan dengan rentang nilai 1 miliar s/d 5 miliar merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di sektor konstruksi.

Pengendali Belanja:

Nilai Biaya Fisik

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp15.850.000,00 per kegiatan

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

49. BIAYA PERENCANAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN, SALURAN *DRAINASE*, PEDESTRIAN DAN JEMBATAN MENURUT BIAYA FISIK 0 S/D 500 JUTA

Deskripsi:

Presentase biaya perencanaan untuk kegiatan pembangunan jalan, saluran drainase, pedestrian dan jembatan untuk anggaran s/d 500 juta (lima ratus juta).

Pengendali Belanja:

Nilai biaya fisik pekerjaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= >3,80% dari biaya fisik perencanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp0,00} + (>3,80\% \times \text{nilai biaya fisik pekerjaan}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

50. BIAYA PERENCANAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN, SALURAN *DRAINASE*, PEDESTRIAN DAN JEMBATAN MENURUT BIAYA FISIK 500 JUTA S/D 1 MILIAR

Deskripsi:

Presentase biaya perencanaan untuk kegiatan pembangunan jalan, saluran drainase, pedestrian dan jembatan untuk anggaran 500 (lima ratus juta) s/d 1 miliar (satu miliar).

Pengendali Belanja:

Nilai biaya fisik pekerjaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= >3,80% s/d 2,80% dari biaya fisik perencanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp0,00} + (>3,80\% \text{ s/d } 2,80\% \times \text{nilai biaya fisik pekerjaan}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

51. BIAYA PERENCANAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN, SALURAN *DRAINASE*, PEDESTRIAN DAN JEMBATAN MENURUT BIAYA FISIK 1 MILIAR S/D 2 MILIAR

Deskripsi:

Presentase biaya perencanaan untuk kegiatan pembangunan jalan, saluran drainase, pedestrian dan jembatan untuk anggaran 1 miliar s/d 2 miliar.

Pengendali Belanja:

Nilai biaya fisik pekerjaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= >2,80% s/d 2,40% dari biaya fisik perencanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (>2,80% s/d 2,40% x nilai biaya fisik pekerjaan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

52. BIAYA PERENCANAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN, SALURAN DRAINASE, PEDESTRIAN DAN JEMBATAN MENURUT BIAYA FISIK DIATAS 2 MILIAR

Deskripsi:

Presentase biaya perencanaan untuk kegiatan pembangunan jalan, saluran drainase, pedestrian dan jembatan untuk anggaran lebih dari 2 miliar.

Pengendali Belanja:

Nilai biaya fisik pekerjaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= <2,40% dari biaya fisik perencanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (<2,40% x nilai biaya fisik pekerjaan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

53. BIAYA PENGAWASAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN, SALURAN DRAINASE, PEDESTRIAN DAN JEMBATAN MENURUT BIAYA FISIK 0 S/D 500 JUTA

Deskripsi:

Presentase biaya pengawasan untuk kegiatan pembangunan jalan, saluran drainase, pedestrian dan jembatan untuk anggaran s/d 500 juta.

Pengendali Belanja:

Nilai biaya fisik pekerjaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= >3,76% dari biaya fisik perencanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (>3,76% x nilai biaya fisik pekerjaan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

54. BIAYA PENGAWASAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN, SALURAN DRAINASE, PEDESTRIAN DAN JEMBATAN MENURUT BIAYA FISIK 500 JUTA S/D 1 MILIAR

Deskripsi:

Presentase biaya pengawasan untuk kegiatan pembangunan jalan, saluran drainase, pedestrian dan jembatan untuk anggaran 500 juta s/d 1 miliar.

Pengendali Belanja:

Nilai biaya fisik pekerjaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= >3,76% s/d 2,75% dari biaya fisik perencanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (>3,76% s/d 2,75% x nilai biaya fisik pekerjaan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

55. BIAYA PENGAWASAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN, SALURAN DRAINASE, PEDESTRIAN DAN JEMBATAN MENURUT BIAYA FISIK 1 MILIAR S/D 2 MILIAR

Deskripsi:

Presentase biaya pengawasan untuk kegiatan pembangunan jalan, saluran drainase, pedestrian dan jembatan untuk anggaran 1 miliar s/d 2 miliar.

Pengendali Belanja:

Nilai biaya fisik pekerjaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= >2,75% s/d 1,98% dari biaya fisik perencanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (>2,75% s/d 1,98% x nilai biaya fisik pekerjaan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

56. BIAYA PENGAWASAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN, SALURAN DRAINASE, PEDESTRIAN DAN JEMBATAN MENURUT BIAYA FISIK DIATAS 2 MILIAR

Deskripsi:

Presentase biaya pengawasan untuk kegiatan pembangunan jalan, saluran drainase, pedestrian dan jembatan untuk anggaran lebih dari 2 miliar.

Pengendali Belanja:

Nilai biaya fisik pekerjaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= <1,98% dari biaya fisik perencanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (<1,98% x nilai biaya fisik pekerjaan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

57. BIAYA BP-UJL (BIAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 450 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 450 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum. Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran dan penyambungan jaringan hingga titik panel Penerangan Jalan Umum.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 699.300,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp699.300,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

58. BIAAYA BP-UJL (BIAAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 900 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 900 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum. Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel Penerangan Jalan Umum.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 1.398.600,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp1.398.600,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

59. BIAAYA BP-UJL (BIAAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 1300 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 1300 VA (seribu tiga ratus volt ampere) sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum. Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel Penerangan Jalan Umum.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 2.020.200,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp2.020.200,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

60. BIAAYA BP-UJL (BIAAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 2200 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 2200 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum. Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel Penerangan Jalan Umum.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 3.418.800,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp3.418.800,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

61. BIAYA BP-UJL (BIAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 3500 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 3500 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum. Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel Penerangan Jalan Umum.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 5.439.000,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp5.439.000,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

62. BIAYA BP-UJL (BIAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 4400 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 4400 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum (PJU). Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel PJU.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 6.837.600,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp } 6.837.600,00 \times \text{jumlah pemasangan}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

63. BIAYA BP-UJL (BIAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 5500 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 5500 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum. Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel Penerangan Jalan Umum.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

$$= \text{Rp}0,00 \text{ Per kegiatan}$$

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

$$= \text{Rp } 8.547.000,00 \text{ per ls}$$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp } 8.547.000,00 \times \text{jumlah pemasangan}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

64. BIAYA BP-UJL (BIAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 6600 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 6600 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum (PJU). Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel PJU.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

$$= \text{Rp}0,00 \text{ Per kegiatan}$$

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 9.890.100,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 9.890.100,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

65. BIAYA BP-UJL (BIAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 7700 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 7700 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum. Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel Penerangan Jalan Umum.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 11.965.800,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 11.965.800,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

66. BIAYA BP-UJL (BIAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 11000 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 11000 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum. Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel Penerangan Jalan Umum.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 17.094.000,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 17.094.000,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

67. BIAYA BP-UJL (BIAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 10600 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 10600 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum. Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel Penerangan Jalan Umum.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 15.884.100,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 15.884.100,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

68. BIAYA BP-UJL (BIAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 13200 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 13200 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum (PJU). Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel PJU.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 19.780.200,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 19.780.200,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

69. BIAYA BP-UJL (BIAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 16500 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 16500 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum. Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel Penerangan Jalan Umum.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 24.725.250,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 24.725.250,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

70. BIAAYA BP-UJL (BIAAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 23000 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 23000 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum (PJU). Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel PJU.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 34.465.500,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 34.465.500,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

71. BIAAYA BP-UJL (BIAAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 41500 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 41500 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum (PJU). Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel PJU.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 62.187.750,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp } 62.187.750,00 \times \text{jumlah pemasangan}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

72. BIAYA BP-UJL (BIAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 53000 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 53000 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum (PJU). Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel PJU.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 79.420.500,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp } 79.420.500,00 \times \text{jumlah pemasangan}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

73. BIAYA BP-UJL (BIAYA PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN LISTRIK) DAYA 66000 VA

Deskripsi:

Merupakan biaya yang dibayarkan kepada pihak penyedia listrik (PLN) untuk pemasangan sambungan baru jaringan listrik daya 66000 VA sebagai sumber energi bagi sistem Penerangan Jalan Umum (PJU). Biaya ini mencakup administrasi, pemasangan meteran, dan penyambungan jaringan hingga titik panel PJU.

Pengendali Belanja:

Jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 98.901.000,00 per ls

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 98.901.000,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

74. PEMASANGAN PANEL PJU KOMPONEN LENGKAP – DAYA 1 PHASE

Deskripsi:

Pekerjaan instalasi panel PJU 1 phase lengkap dengan komponen pengaman, MCB, kontaktor, timer, dan terminal distribusi. Panel ini berfungsi sebagai pusat distribusi dan kontrol operasional lampu PJU, dirancang untuk penggunaan luar ruang dengan sistem pengaman sesuai standar kelistrikan.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 7.265.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 7.265.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

75. PEMASANGAN PANEL PJU KOMPONEN LENGKAP – DAYA 3 PHASE

Deskripsi:

Pekerjaan instalasi panel PJU 3 phase lengkap dengan komponen pengaman, MCB, kontaktor, timer, dan terminal distribusi. Panel ini berfungsi sebagai pusat distribusi dan kontrol operasional lampu PJU, dirancang untuk penggunaan luar ruang dengan sistem pengaman sesuai standar kelistrikan.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 35.646.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 35.646.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

76. ARMATURE LAMPU PJU TIPE LED 40 WATT

Deskripsi:

Pemasangan armatur lampu PJU dengan teknologi LED berdaya 40 Watt. Lampu ini hemat energi, tahan lama, dan menghasilkan pencahayaan optimal untuk jalan lingkungan dan jalan lokal. Termasuk kelengkapan bracket dan konektor ke jaringan.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 5.030.001,00 per unit

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 5.030.001,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

77. ARMATURE LAMPU PJU TIPE LED 60 WATT

Deskripsi:

Pemasangan armatur lampu PJU dengan teknologi LED berdaya 60 Watt. Lampu ini hemat energi, tahan lama, dan menghasilkan pencahayaan optimal untuk jalan lingkungan dan jalan lokal. Termasuk kelengkapan bracket dan konektor ke jaringan.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 5.220.000,00 per unit

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 5.220.000,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

78. ARMATURE LAMPU PJU TIPE LED 90 WATT

Deskripsi:

Pemasangan armatur lampu PJU dengan teknologi LED berdaya 90 Watt. Lampu ini hemat energi, tahan lama, dan menghasilkan pencahayaan optimal untuk jalan lingkungan dan jalan lokal. Termasuk kelengkapan bracket dan konektor ke jaringan.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 5.445.001,00 per unit

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 5.445.001,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

79. ARMATURE LAMPU PJU TIPE LED 120 WATT

Deskripsi:

Pemasangan armatur lampu PJU dengan teknologi LED berdaya 120 Watt. Lampu ini hemat energi, tahan lama, dan menghasilkan pencahayaan optimal untuk jalan lingkungan dan jalan lokal. Termasuk kelengkapan bracket dan konektor ke jaringan.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 5.695.000,00 per unit

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 5.695.000,00 x jumlah pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

80. REKONDISI ARMATURE LAMPU PJU TIPE LED 40 WATT

Deskripsi:

Pekerjaan perbaikan atau peremajaan armature lampu PJU LED 40 Watt yang telah rusak atau tidak berfungsi optimal. Pekerjaan meliputi pengecekan komponen, penggantian modul LED/drivernya, dan pembersihan housing.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik perbaikan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 5.275.001,00 per unit

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 5.275.001,00 x jumlah titik perbaikan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

81. REKONDISI ARMATURE LAMPU PJU TIPE LED 60 WATT

Deskripsi:

Pekerjaan perbaikan atau peremajaan armature lampu PJU LED 60 Watt yang telah rusak atau tidak berfungsi optimal. Pekerjaan meliputi pengecekan komponen, penggantian modul LED/drivernya, dan pembersihan housing.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik perbaikan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 5.465.000,00 per unit

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 5.465.000,00 x jumlah titik perbaikan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

82. REKONDISI ARMATURE LAMPU PJU TIPE LED 90 WATT

Deskripsi:

Pekerjaan perbaikan atau peremajaan armature lampu PJU LED 90 (sembilan puluh) Watt yang telah rusak atau tidak berfungsi optimal. Pekerjaan meliputi pengecekan komponen, penggantian modul LED/drivernya, dan pembersihan housing.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik perbaikan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 5.690.001,00 per unit

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 5.690.001,00 x jumlah titik perbaikan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

83. REKONDISI ARMATURE LAMPU PJU TIPE LED 120 WATT

Deskripsi:

Pekerjaan perbaikan atau peremajaan armature lampu PJU LED 120 Watt yang telah rusak atau tidak berfungsi optimal. Pekerjaan meliputi pengecekan komponen, penggantian modul LED/drivernya, dan pembersihan housing.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik perbaikan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 5.940.000,00 per unit

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 5.940.000,00 x jumlah titik perbaikan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

84. BIAYA JASA REKONDISI – JASA PENGGANTIAN ARMATURE LAMPU PJU

Deskripsi:

Merupakan biaya jasa tenaga kerja untuk melakukan penggantian atau perbaikan armatur lampu PJU. Tidak termasuk biaya material, hanya pekerjaan teknis di lapangan untuk penggantian unit armatur yang rusak.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik penggantian

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 245.000,00 per unit

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 245.000,00 x jumlah titik penggantian)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

85. JARINGAN DISTRIBUSI BAGI LAMPU PJU: JARINGAN 1 PHASE KABEL NFA2X 2X10 MM

Deskripsi:

Pekerjaan pemasangan kabel jaringan distribusi listrik 1 phase untuk PJU menggunakan kabel udara (overhead) tipe NFA2X berukuran 2x10 mm. Digunakan untuk menyalurkan daya dari panel ke titik-titik lampu PJU.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 641.000,00 per gawang

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 641.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

86. JARINGAN DISTRIBUSI BAGI LAMPU PJU: JARINGAN 1 PHASE KABEL NFA2X 2X16 MM

Deskripsi:

Pekerjaan pemasangan kabel jaringan distribusi listrik 1 phase untuk PJU menggunakan kabel udara (overhead) tipe NFA2X berukuran 2x16 mm. Digunakan untuk menyalurkan daya dari panel ke titik-titik lampu PJU.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 683.000,00 per gawang

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 683.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

87. JARINGAN DISTRIBUSI BAGI LAMPU PJU: JARINGAN 3 PHASE KABEL NFA2X 4X16 MM

Deskripsi:

Pekerjaan pemasangan kabel jaringan distribusi listrik 3 phase untuk PJU menggunakan kabel udara (overhead) tipe NFA2X berukuran 4x16 mm. Digunakan untuk menyalurkan daya dari panel ke titik-titik lampu PJU.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp1.333.000,00 per gawang

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp1.333.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

88. TIANG BASE PLAT LAMPU PJU ARTISTIK 9 METER SINGLE ORNAMEN (TIANG PATRIOT) – JARINGAN 1 PHASE

Deskripsi:

Pekerjaan pemasangan tiang PJU model artistik (Patriot) dengan tinggi 9 meter, dilengkapi satu ornamen dan sistem pemasangan dengan base plat. Digunakan pada jalan kota, area publik, atau kawasan tematik dengan desain estetik.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 9.686.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 9.686.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

89. TIANG LAMPU PJU ARTISTIK DOBLE ORNAMEN 10 METER (TIANG PATRIOT) – JARINGAN 1 PHASE

Deskripsi:

Pemasangan tiang lampu artistik 10 meter dengan dua ornamen (kiri dan kanan), memberikan pencahayaan simetris. Desain patriotik, cocok untuk jalan protokol atau area publik dengan nilai estetika tinggi.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 12.917.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 12.917.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

90. TIANG BASE PLAT LAMPU PJU ARTISTIK 9 METER SINGLE ORNAMEN (TIANG PATRIOT) – JARINGAN 3 PHASE

Deskripsi:

Pekerjaan pemasangan tiang PJU model artistik (Patriot) dengan tinggi 9 meter, dilengkapi satu ornamen dan sistem pemasangan dengan base plat. Digunakan pada jalan kota, area publik, atau kawasan tematik dengan desain estetik.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 10.336.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 10.336.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

91. TIANG LAMPU PJU ARTISTIK DOBLE ORNAMEN 10 METER (TIANG PATRIOT) – JARINGAN 3 PHASE

Deskripsi:

Pemasangan tiang lampu artistik 10 meter dengan dua ornamen (kiri dan kanan), memberikan pencahayaan simetris. Desain patriotik, cocok untuk jalan protokol atau area publik dengan nilai estetika tinggi.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 13.567.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 13.567.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

92. TIANG LAMPU PJU POLIGONAL SINGLE STANG ORNAMEN 9 METER (SIKU/PARABOLA) – JARINGAN 1 PHASE

Deskripsi:

Pekerjaan pemasangan tiang PJU berbentuk poligonal dengan tinggi 9 meter, dilengkapi satu stang ornamen model siku atau parabola. Cocok untuk jalan lingkungan dan jalan kolektor dengan desain modern.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 12.917.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 12.917.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

93. TIANG LAMPU PJU POLIGONAL DOBLE STANG ORNAMEN 10 METER (SIKU/PARABOLA) – JARINGAN 1 PHASE

Deskripsi:

Pemasangan tiang poligonal 10 meter dengan dua stang ornamen model siku/parabola. Memberikan pencahayaan ke dua arah jalan secara merata, umum digunakan di median jalan dua arah.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 9.686.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 9.686.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

94. TIANG LAMPU PJU POLIGONAL SINGLE STANG ORNAMEN 9 METER (SIKU/PARABOLA) – JARINGAN 3 PHASE

Deskripsi:

Pekerjaan pemasangan tiang PJU berbentuk poligonal dengan tinggi 9 meter, dilengkapi satu stang ornamen model siku atau parabola. Cocok untuk jalan lingkungan dan jalan kolektor dengan desain modern.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 13.567.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 13.567.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

95. TIANG LAMPU PJU POLIGONAL DOBLE STANG ORNAMEN 10 METER (SIKU/PARABOLA) – JARINGAN 3 PHASE

Deskripsi:

Pemasangan tiang poligonal 10 meter dengan dua stang ornamen model siku/parabola. Memberikan pencahayaan ke dua arah jalan secara merata, umum digunakan di median jalan dua arah.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp10.336.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 10.336.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

96. TIANG PJU TANAM – TIANG LAMPU PJU BOTOL 5 METER (DIMENSI 3” 5M + STANG 1,5” 50 CM) – JARINGAN 1 *PHASE*

Deskripsi:

Pemasangan tiang lampu tanam model botol dengan tinggi efektif 5 meter dan stang 50 cm berdiameter 1,5 inch. Sistem tanam langsung ke dalam tanah (tanpa base plat), digunakan di area lokal atau perumahan.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 5.636.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 5.636.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

97. TIANG PJU TANAM – TIANG LAMPU PJU BOTOL 7 METER (DIMENSI 4” 5M + STANG 3” 2 M) – JARINGAN 1 PHASE

Deskripsi:

Pemasangan tiang lampu tanam model botol dengan tinggi efektif 7 meter dan stang 2 m berdiameter 3 inch. Sistem tanam langsung ke dalam tanah (tanpa base plat), digunakan di area lokal atau perumahan.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 8.396.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 8.396.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

98. TIANG PJU TANAM – TIANG LAMPU PJU BOTOL 8 METER (DIMENSI 5” 5M + STANG 4” 3 M) – JARINGAN 1 PHASE

Deskripsi:

Pemasangan tiang lampu tanam model botol dengan tinggi efektif 8 meter dan stang 3 m berdiameter 4 inch. Sistem tanam langsung ke dalam tanah (tanpa base plat), digunakan di area lokal atau perumahan.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 8.459.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 8.459.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

99. TIANG PJU TANAM – TIANG LAMPU PJU BOTOL 7 METER (DIMENSI 4” 5M + STANG 3” 2 M) – JARINGAN 3 PHASE

Deskripsi:

Pemasangan tiang lampu tanam model botol dengan tinggi efektif 7 meter dan stang 2 m berdiameter 3 inch. Sistem tanam langsung ke dalam tanah (tanpa base plat), digunakan di area lokal atau perumahan.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 9.046.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 9.046.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

100. TIANG PJU TANAM – TIANG LAMPU PJU BOTOL 8 METER (DIMENSI 5” 5M + STANG 4” 3 M) – JARINGAN 3 PHASE

Deskripsi:

Pemasangan tiang lampu tanam model botol dengan tinggi efektif 8 meter dan stang 3 m berdiameter 4 inch. Sistem tanam langsung ke dalam tanah (tanpa base plat), digunakan di area lokal atau perumahan.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp9.109.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 9.109.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

101. PJU EKSISTING JARINGAN 1 *PHASE* – PEMASANGAN PJU STANG ORNAMEN PANJANG 3 METER DIAMETER 2” + CLAMP

Deskripsi:

Pekerjaan penambahan atau penggantian stang ornamen pada tiang PJU eksisting untuk jaringan 1 phase. Stang sepanjang 3 meter berdiameter 2 inch dipasang dengan sistem penjepit (clamp) ke tiang eksisting, untuk mendukung armatur lampu baru.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 2.319.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 2.319.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

102. PJU EKSISTING JARINGAN 1 *PHASE* – PEMASANGAN PJU STANG ORNAMEN PANJANG 2 METER DIAMETER 2” + CLAMP

Deskripsi:

Pekerjaan penambahan atau penggantian stang ornamen pada tiang PJU eksisting untuk jaringan 1 phase. Stang sepanjang 2 meter berdiameter 2 inch dipasang dengan sistem penjepit (clamp) ke tiang eksisting, untuk mendukung armatur lampu baru.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 2.113.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 2.113.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

103. PJU *EKSISTING* JARINGAN 1 *PHASE* – PEMASANGAN PJU STANG ORNAMEN PANJANG 1,5 METER DIAMETER 2” + CLAMP

Deskripsi:

Pekerjaan penambahan atau penggantian stang ornamen pada tiang PJU eksisting untuk jaringan 1 phase. Stang sepanjang 1,5 meter berdiameter 2 inch dipasang dengan sistem penjepit (clamp) ke tiang eksisting, untuk mendukung armatur lampu baru.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 2.016.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 2.016.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

104. PJU *EKSISTING* JARINGAN 1 *PHASE* – PEMASANGAN PJU STANG ORNAMEN PANJANG 1 METER DIAMETER 2” + CLAMP

Deskripsi:

Pekerjaan penambahan atau penggantian stang ornamen pada tiang PJU eksisting untuk jaringan 1 phase. Stang sepanjang 1 meter berdiameter 2 inch dipasang dengan sistem penjepit (clamp) ke tiang eksisting, untuk mendukung armatur lampu baru.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 1.784.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

$$= \text{Rp}0,00 + (\text{Rp } 1.784.000,00 \times \text{jumlah titik pemasangan})$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

105. PJU EKSISTING JARINGAN 3 PHASE – PEMASANGAN PJU STANG ORNAMEN PANJANG 3 METER DIAMETER 2” + CLAMP

Deskripsi:

Pekerjaan penambahan atau penggantian stang ornamen pada tiang PJU eksisting untuk jaringan 3 phase. Stang sepanjang 3 meter berdiameter 2 inch dipasang dengan sistem penjepit (clamp) ke tiang eksisting, untuk mendukung armatur lampu baru.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

$$= \text{Rp}0,00 \text{ Per kegiatan}$$

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

$$= \text{Rp } 2.969.000,00 \text{ per set}$$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

$$= \text{Rp}0,00 + (\text{Rp } 2.969.000,00 \times \text{jumlah titik pemasangan})$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

106. PJU EKSISTING JARINGAN 3 PHASE – PEMASANGAN PJU STANG ORNAMEN PANJANG 2 METER DIAMETER 2” + CLAMP

Deskripsi:

Pekerjaan penambahan atau penggantian stang ornamen pada tiang PJU eksisting untuk jaringan 3 phase. Stang sepanjang 2 meter berdiameter 2 inch dipasang dengan sistem penjepit (clamp) ke tiang eksisting, untuk mendukung armatur lampu baru.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

$$= \text{Rp}0,00 \text{ Per kegiatan}$$

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

$$= \text{Rp } 2.763.000,00 \text{ per set}$$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp } 2.763.000,00 \times \text{jumlah titik pemasangan}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

107. PJU *EKSISTING* JARINGAN 3 *PHASE* – PEMASANGAN PJU STANG ORNAMEN PANJANG 1,5 METER DIAMETER 2” + CLAMP

Deskripsi:

Pekerjaan penambahan atau penggantian stang ornamen pada tiang PJU eksisting untuk jaringan 3 phase. Stang sepanjang 1,5 meter berdiameter 2 inch dipasang dengan sistem penjepit (clamp) ke tiang eksisting, untuk mendukung armatur lampu baru.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 2.666.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja tetap} + \text{Belanja variabel} \\ & = \text{Rp}0,00 + (\text{Rp } 2.666.000,00 \times \text{jumlah titik pemasangan}) \end{aligned}$$

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

108. PJU *EKSISTING* JARINGAN 3 *PHASE* – PEMASANGAN PJU STANG ORNAMEN PANJANG 1 METER DIAMETER 2” + CLAMP

Deskripsi:

Pekerjaan penambahan atau penggantian stang ornamen pada tiang PJU eksisting untuk jaringan 3 (tiga) phase. Stang sepanjang 1 (satu) meter berdiameter 2 (dua) inch dipasang dengan sistem penjepit (clamp) ke tiang eksisting, untuk mendukung armatur lampu baru.

Pengendali Belanja:

Cakupan jumlah titik pemasangan

Satuan Pengendali Belanja Tetap:

= Rp0,00 Per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel:

= Rp 2.434.000,00 per set

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja tetap + Belanja variabel

= Rp0,00 + (Rp 2.434.000,00 x jumlah titik pemasangan)

Adapun besaran biaya penunjang ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dengan pertimbangan besaran pagu anggaran, nilai kewajaran kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 34